PULAU REMPANG

AKD: PULAU REMPANG

Bulan: September 2023

Oleh: PULAU REMPANG

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektar. Pulau itu terdiri dari dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang. Keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di pulau Rempang. Tokoh warga Pulau Rempang, Gerisman Ahmad mengatakan, di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Warga asli tersebut erdiri dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat yang diyakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834.

Menurut Kemendikbud, Pulau Rempang termasuk juga Pulau Galang awalnya tidak masuk dalam Otorita Batam dan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Riau. Namun setelah dikeluarkannya Kepres No. 28 Tahun 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau sekitarnya. Pulau Rempang terhubung dengan pulau-pulau lain seperti Pulau Batam, dan Galang melalui Jembatan Barelang. Jembatan ini adalah jembatan yang saling sambung-menyambung dan dibangun untuk memperluas Otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam. Nama Barelang adalah singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Jembatan menghubungkan sejumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

Sejak proyek strategis nasional (PSN) bergulir pada 2016, sudah ratusan proyek yang dikerjakan, bahkan lebih dari 100 proyek yang sudah selesai dan beroperasi. Tak sedikit halangan yang dihadapi dalam mewujudkan PSN. Salah satunya terkait pembebasan lahan yang melibatkan masyarakat setempat. Peristiwa kerusuhan di Pulau Rempang menjadi puncak buruknya komunikasi dan keberpihakan kepada hak masyarakat adat dalam merealisasikan PSN. Masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada awal September ini menolak rencana relokasi atau pengosongan lahan 16 kampung adat Melayu yang ditawarkan pemerintah. Wilayah mereka akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi.

Pengembangan kawasan yang diberi nama Kawasan Rempang Eco-City tersebut merupakan proyek pemerintah pusat melalui kerja sama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Proyek dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Rempang Eco City (REC) yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Keberadaannya membutuhkan ketersediaan tanah, termasuk yang dimiliki warga masyarakat kampung tua, dengan konsekuensi harus merelokasi 5.000-10.000 warga ke Pulau Galang.

Sumber:

https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/10/130000065/profil-pulau-rempang-kepulauan-riau-yang-seluruh-warganya-akan-digusur?page=all

https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/12/pulau-rempang-diharapkan-jadi-motor-baru-pertumbuhan-ekonomi?open_from=Search_Result_

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Andre Rosiade ke Menteri Bahlil: Segera Selesaikan Masalah Investasi di Pulau Rempang!	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46481/t/Andre%20Rosiade%20ke%20Menteri%20Bahlil:%20Segera%20Selesaikan%20Masalah%20Investasi%20di%20Pulau%20Rempang!
Berita	Bentrokan di Pulau Rempang, Luluk Ingatkan Proyek Investasi Jangan Rugikan Rakyat	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46663/t/Bentrokan%20di%20Pulau%20Rempang,%20Luluk%20Ingatkan%20Proyek%20Investasi%20Jangan%20Rugikan%20Rakyat
Berita	Kehadiran Negara dalam Konflik Rempang	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18041
Berita	Kepolisian Harusnya Melindungi Bukan Mengancam Masyarakat Adat	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46395/t/Kepolisian%20Harusnya%20Melindungi%20Bukan%20Mengancam%20Masyarakat%20Adat
Berita	Komisi III akan Dalami Tindakan Represif Aparat Gabungan kepada Warga di Pulau Rempang	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46425/t/%20Komisi%20III%20akan%20Dalami%20Tindakan%20Represif%20Aparat%20Gabungan%20kepada%20Warga%20di%20Pulau%20Rempang
Berita	Komisi III Akan Panggil Pengusaha dan Investor di Pulau Rempang	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46598/t/Komisi%20III%20Akan%20Panggil%20Pengusaha%20dan%20Investor%20di%20Pulau%20Rempang
Berita	Konflik di Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Utamakan Pendekatan Humanis	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18044
Berita	Konflik Pulau Rempang dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18051
Berita	Luluk Nur Hamidah: Saya Dukung Komnas HAM Usut Penembakan Gas Air Mata di Rempang	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46664/t/Luluk%20Nur%20Hamidah:%20Saya%20Dukung%20Komnas%20HAM%20Usut%20Penembakan%20Gas%20Air%20Mata%20di%20Rempang
Berita	Memahami Kasus Pulau Rempang	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18042
Berita	Mengurai Konflik Rempang	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18040
Berita	Pendekatan Humanis di Rempang	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18043
Berita	Perjuangkan Hak Warga Rempang, Perwakilan Warga Temui Komnas HAM	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18047
Berita	Presiden Jokowi: Masalah di Rempang Imbas Komunikasi yang Kurang Baik	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18046
Berita	Pulau Rempang dan Ragam Respons dari Poros Koalisi Parpol	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18049
Berita	Pulau Rempang Diharapkan Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18050
Berita	Pulau Rempang Miliki Akar Sejarah yang Harus Dihormati dan Diperhatikan dalam Pembangunan	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46669/t/Pulau%20Rempang%20Miliki%20Akar%20Sejarah%20yang%20Harus%20Dihormati%20dan%20Diperhatikan%20dalam%20Pembangunan
Berita	Rempang, Proyek Strategis Nasional, dan Luka Sosial	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18048

Berita	Subardi Minta Kepala BP Batam Terbuka Jelaskan Persoalan di Pulau Rempang	https://www.dpr.go.id/berita/d \netail/id/46565/t/Subardi%20Min \nta%20Kepala%20BP%20Batam%20Ter \nbuka%20Jelaskan%20Persoalan%20 \ndi%20Pulau%20Rempang
Berita	Tahap Pertama, Empat Kampung di Rempang Akan Direlokasi	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/18045
Jurnal	Adat Law in Indonesia	jstor.org
Jurnal	Does Institutional Activism Strengthen Democracy? A Case Study of Agrarian and Anti-Corruption Movements in Indonesia	jstor.org
Jurnal	Implementasi Undang-Undang Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional	https://j-innovative.org/index \n.php/Innovative/article/view/5 \n07/473
Jurnal	INDONESIA'S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UNDER THE JOKOWI ADMINISTRATION	jstor.org
Jurnal	Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies	jstor.org
Jurnal	Kedudukan Hukum Tukar Menukar Tanah Aset Desa Bagi Kepentingan Strategis Nasional	https://mail.online-journal.un \nja.ac.id/Mendapo/article/view/ \n23237/15205
Jurnal	Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional Terkait Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terdampak	https://ejournal.nusantaraglob \nal.ac.id/index.php/sentri/arti \ncle/view/1525/1423
Jurnal	Pengembangan Potensi Kearifan Lokal Yang Mendukung Pariwisata Di Kampung Tua Patam Lestari Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam	http://ejurnal.univbatam.ac.id \n/index.php/Potensi/article/vie \nw/1214
Jurnal	Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional pada Masyarakat Pesisir	https://journal.uib.ac.id/inde \nx.php/sasenal/article/view/745 \n4/2973
Jurnal	Peran Infrastruktur Dalam Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional	https://berkas.dpr.go.id/pusli \nt/files/policy_brief/Policy%20 \nBrief-28-1-M-2023.pdf
Jurnal	Peranan Profesi Penilai Publik Terhadap Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Sesuai Dengan Perpres No.3 Tahun 2016	https://journals.usm.ac.id/ind \nex.php/humani/article/view/635 \n9
Jurnal	Percepatan Proyek Strategis Nasional	https://berkas.dpr.go.id/pusli \nt/files/info_singkat/Info%20Si \nngkat---16-II-P3DI-Agustus-202 \n2-1957.pdf
Jurnal	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Dan Strategi Kebijakan	https://berkas.dpr.go.id/pusli \nt/files/info_singkat/Info%20Si \nngkat-XV-8-II-P3DI-April-2023- \n224.pdf
Jurnal	Resolving Land Conflicts in Indonesia	jstor.org
Jurnal	The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia	jstore.org
Jurnal	The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia	jstore.org
Jurnal	Using International Institutions to Improve Public Procurement	jstor.org
Buku	Hukum Adat Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=14 \n147&keywords=hukum%20adat
Buku	Hukum agararia dan masyarakat di Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=24 \n125&keywords=hukum%20agraria
Buku	Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=19 \n959&keywords=hukum%20agraria

Buku	Hukum agraria sengketa pertanahan: Penyelesaiannya melalui arbitrase dalam teori dan praktik	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=31 \n353&keywords=hukum%20agraria
Buku	Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=20 \n215&keywords=hukum%20adat
Buku	Lubuk dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=30 \n423&keywords=masyarakat%20adat
Buku	Membangun Indonesia: negara kebangsaan dan masyarakat hukum adat	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=26 \n016&keywords=hukum%20adat
Buku	Negara dan Masyarakat Hukum Adat	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=31 \n330&keywords=hukum%20adat
Buku	Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah: Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur di Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=31 \n284&keywords=hukum%20agraria
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	https://peraturan.go.id/id/per \nmenko-perekonomian-no-21-tahun \n-2022
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/198374/permenko-perekono \nmian-no-7-tahun-2021
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/219198/permenko-perekono \nmian-no-9-tahun-2022
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/152706/perpres-no-109-ta \nhun-2020
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/38201/perpres-no-3-tahun \n-2016
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/88217/perpres-no-56-tahu \nn-2018
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/72972/perpres-no-58-tahu \nn-2017
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	https://peraturan.bpk.go.id/De \ntails/41567/perpres-no-75-tahu \nn-2014
Undang-undang & Peraturan	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	https://www.dpr.go.id/dokakd/d \nokumen/RJ2-20200226-051940-249 \n5.pdf
Surat kabar	Kasus Pulau Rempang Komisi III Segera Panggil Investor	https://kliping.dpr.go.id/inde \nx/detail/id/45342